

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadis

Al - Quran Kemenak Al-Baqarah ayat 126. t.t.
Hadits Riwayat Tirmidzi No. 2268. t.t.

Buku

- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Cetakan 1. Unpam Press, 2019.
- Dava Ario Seno dan Syahril Yuska. *Implementasi Manajemen Strategi pada Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Kelas IIA Gunung Sindur*. 2022.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Balai Pustaka, 2000.
- Ebta Setiawan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Badan Pengembangan, 2023.
- Elisa. *Pengertian, Peranan, dan Fungsi Kurikulum*. 2018.
- Ena Sihombing. *Hukum Pemerintahan Desa*. 2021.
- Eva Eviany. *Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan*. Nasmedia, 2023.
- Jumadi. *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia*. 2018, 38.
- Mahendra Putra Kurnia. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif: Urgensi, strategi, Dan Proses Bagi Pembentukan Perda Yang Baik*. Kreasi Total Media, 2007.
- Marjuki Al Mujakir. *Kajian Pengantar Filsafat Teoritis Dan Praktis (Karya Filosof Muslim Murtadha Muthahhari)*. Luluklatfah, 2022.
- Misdyanti. *Fungsi Pemerintah Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah*. Bumi Aksara, 1993.
- Muhammad Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Mukti Fajar ND dan dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Belajar, 2010.
- Nursapia Harahap. *Penelitian Kualitatif*. Wal Ashri Publishing, 2020.
- Padmo Wahyono. *Pengantar Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soerjono Soekanto. *Efektivikasi Hukum Dan Peranan Sanksi*. Remadja Karya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, 2017.
- Sutiyo. *Perlindungan Masyarakat Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban*

- Umum, Dan Manajemen Kebencanaan*. PT. Nas Media Indonesia, 2023.
- Syaikh Dr Muhammad Musa Alu Nashr. *Pentingnya Stabilitas Keamanan dalam Islam*. Yayasan Lajnah Istiqomah Surakarta, 2005.
- Syaukani. *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*. Pustaka Belajar Kedsama Dengan Puskap, 2002.
- Trianto. *Bunga Rampas Hakikat Keilmuan Ilmu Hukum, Suatu Tinjauan Dari Sudut Pandang Filsafat Ilmu*. Prestasi Pustaka Publisher, 2007.
- Nurani, M. F. (2018). *Pembayaran Gaji PNS Telaah Perjanjian Kerjasama Kemenag dan BRI*. Banjarmasin: Gramedia.
- Rifqi, A. (2017). *Manajemen Keuangan Syariah*. Bandung: Pustaka.

Skripsi / Tesis

- Keamanan di Desa Aek Nauli Kecamatan Batang Angkola.” Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpun, 2021.
- Ari Andari Khotbah Siregar. “Peran Bhabinkamtibmas Dalam Pembinaan Arikunto S. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta, 2010.
- Berani Pa. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru.” Universitas Medan Area, 2023.
- Bagir Manan. *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Berani Pa. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Wilayah Kecamatan Medan Baru.” Universitas Medan Area, 2023.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Ilham Effendy. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Berau*. 8 (2020): 293.
- Muhammad Syamsudin. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Ni Luh Ketut Sukarniti. *Desa Adat Sebagai Pembentuk Disiplin Dan Pemersatu Krama Desa*. 2018.
- Nina Eisabet Lelet dan Alden Laloma. *Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*. 2022.
- Novita Saputri. *Peran Serta Poskamling Dalam Menjaga Keamanan Lingkungan Desa Limbur Merangin*. 2023.
- Bagir Manan. *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Rudi Herman. “Efektivitas Akad Murabahah Terhadap Pelaksanaan Pembelian Barang Melalui BMT.” IAIN Metro, 2020.
- Sumi Febriana Fadilah. “Peran Polmas Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban di Kelurahan Magersari Kota MAgelang.” Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.
- Wahyudi. “Efektivitas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Pajak Daerah (Studi Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah).” Universitas Muhammadiyah Malang, 2024.

Jurnal

- Alia Yassinta Echa Putri. *Efektivitas adalah Pengertian, Pendekatan, dan Kriteria Pengukuran*. 22 September 2023.
- Bagir Manan. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Pusat Studi Hukum U11, 2001.
- Bambang Leo Handoko. *Kontribusi Teoritis dan Kontribusi Praktis Dalam Penelitian*. 2022.
- Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, dan Suprpto. *Analisis Undang-Undang Desa*. 2019.
- Amiroeddin Syarif. *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Bina Aksara, 1987.
- Bagir Manan. *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah*. Pusat Penerbitan LPPM Universitas Bandung, 1995.
- Dwi Arini Margayaningsih. *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 2018.
- Dwi Arini Margayaningsih. *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 2018.
- Galih Orlando. *Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia*. 2022, 50–51.
- Gde Pantja Astawa. *Peraturan Daerah Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah RT Dan RW*. 11 Januari 2006, 9–10.
- Hasanuddin Hasim. *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem*. 2 Desember 2017, 125–26.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, 2017.
- IshJanus Lumban Sidabalok. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Jumadi. *Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia*. t.t., 34–36.
- Lina Tabitha Mandala. *Pengelolaan Hutan Oleh Dayak Halong Maratus (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Halong Desa Uren Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan*. 2 Agustus 2022, 178.
- Natabaya. *Sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*. Konstitusi Press, 2008.
- Abdul Fatah Fanani, Wahyu Astutik, Dodik Wahyono, dan Suprpto. *Analisis Undang-Undang Desa*. 2019.
- Amiroeddin Syarif. *Perundang-Undangan, Dasar, Jenis, Dan Teknik Membuatnya*. Bina Aksara, 1987.
- Riza Prayudi. *Interaksi Timbal Balik Antara Hukum Dan Struktur Sosial Dalam Masyarakat Modern*. 2024, 174–83.
- Suko Prayitno. *Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*. 2017, 112.

Jurnal Asing

- Creswell, J. W. *Research Design : Qualitative, Quantitative, and Mixed*. Sage Publications, 2014.
- Foster Eddy Elvis Gulo dan Fatiani Lase. *The Role of Village Government in Maintaining Security Stability in Harefa Village, North Nias Regency*. 2023.
- Friedman. *The Legal System : A Sosial Science Perspektive*. Russel Soge Foundation, 1969.
- Kerlinger F.N. *Foundations Of Behavioral Research*. 2006.
- Myres S. Mc Dougal *The Identification An Appraisal Of Diverse System Of Publik Order*. 1987, 5.

Sumber lain

- Hardiansyah. *Komunikasi Pelayanan Publik*. Gava Media, 2015.
- Hasyimzoem. *Hukum Pemerintahan Daerah*. t.t., 146.
- Imam Mahdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Teras, 2011

Undang-Undang

- Pemerintah Pusat. *Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*. Administrasi Dan Tata Usaha Negara, 2004.
- Pemerintah Pusat. *Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. 12 Agustus 2011.
- Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Serta Perlindungan masyarakat.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*. 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan (2011).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 69 dan Pasal 76.